

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teori

##### 1. Pemberdayaan Masyarakat

##### a. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat sudah lama dikenal, semakin tigginya angka masyarakat miskin di indonesia di segala lini masyarakat baik yang berada di perkotaan maupun di pedesaan. Tidak sedikit program pemberdayaan masyarakat yang diberikan baik organisasi masyarakat maupun pemerintah dan organisasi profesi, sebagai usaha dalam menyelesaikan kemiskinan, namun belum smeuanya bisa terlaksana dengan maksimal.

Menurut Mardikanto dan Soebiato menjelaskan bahwasannya pemberdayaan merupakan proses aktivitas dalam mengoptimalkan dan menguatkan keberdayaan dalam artian keunggulan dan kemampuan bersaing kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk didalamnya individu yang mengalami permasalahan kemiskinan. Jika memandang pemberdayaan sebagai proses, maka ia merupakan kemampuan dalam ikut serta mendapatkan kesempatan dan mengakses layanan dan sumber daua yang dibutuhkan dalam memperbaiki kualitas hidup baik secara masyarakat, kelompok ataupun individu dalam makna luas. melalui pemahaman ini, pemberdayaan bisa dimaknai dengan proses yang direncanakan guna meningkatkan skala dari objek yang diberdayakan.<sup>1</sup>

Menurut Suharto dikutip dari Hendrawati Hamid, pemberdayaan berkaitan dengan kemampuan manusia, khususnya kelompok lemah dan rentan sehingga mereka mempunyai kemampuan atau kekuatan ketika:

- 1) Pemenuhan kebutuhan dasar manusia sehingga manusia mempunyai kebebasan, hal ini bermaksud

---

<sup>1</sup> Hendrawati Hamid, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat* (Makasar; De La Macca, 2018), 9.

tidak hanya kebebasan dalam memberikan opini, namun juga kebebasan dari rasa sakit, kebodohan dan kelaparan.

- 2) Jangkauan terhadap berbagai sumber produktif yang memungkinkan manusia bisa menambah pendapatannya dan mendapatkan berbagai jasa dan barang yang diinginkan, dibutuhkan dan berkualitas.
- 3) Ikut berpartisipasi dalam aktivitas pembangunan dan keputusan yang memberikan pengaruh pada manusia.<sup>2</sup>

Masyarakat yaitu kumpulan manusia yang berada pada lingkungan kehidupan guna melaksanakan pembangunan yang terstruktur. Masyarakat dikatakan dengan “tempat bersama”, yaitu di dalam wilayah geografis yang sama. Contohnya suatu rukun tetangga, perumahan di kota atau kampung di sebuah desa. Masyarakat sebagai “kepentingan bersama”, yaitu kesamaan kebutuhan didasarkan pada identitas dan kebudayaan.<sup>3</sup>

Pemberdayaan masyarakat sering disamakan dengan pembangunan masyarakat disebabkan disesuaikan dengan pengertian yang tidak sesuai penempatannya di masyarakat. pada penjelasan ini terdapat adanya perbedaan tentang pemberdayaan dan pembangunan masyarakat. Pembangunan masyarakat (*community development*) yaitu digunakan sebagai tempat pemberdayaan masyarakat yang sengaja dilakukan pemerintah untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan.<sup>4</sup>

Sedangkan pemberdayaan masyarakat merupakan strategi alternatif dalam membangun masyarakat yang sudah berkembang dalam beragam pemikiran dan literatur meskipun dalam realitasnya belum optimal dalam melaksanakannya. Pemberdayaan

---

<sup>2</sup> Hendrawati Hamid, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*, 11.

<sup>3</sup> Hendrawati Hamid, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*, 15.

<sup>4</sup> Munawar Noor, *Pemberdayaan Masyarakat*, CIVIS,1, no. 2 (2011):88.

pembangunan masyarakat sering diperbincangkan masyarakat, karena berkaitan dengan perubahan dan kemajuan bangsa ini, kedepannya apalagi jika direlevansikan dengan kemampuan masyarakat yang terbatas akan menghambat pertumbuhan ekonomi.<sup>5</sup>

**b. Konsep Pemberdayaan Masyarakat dalam Islam**

Rasulullah saw telah menerapkan konsep pemberdayaan, penerapan yang diberikan memberikan contoh mengenai prinsip persamaan, keadilan dan saling gotong royong di tengah-tengah masyarakat. Sikap toleransi yang diterapkan pada zaman dimana pemerintahan Rasulullah SAW. Sehingga mempunyai prinsip-prinsip untuk selalu menghargai hasil dari sebuah pekerjaan, saling berbagi dan saking tolongmenolong (ta'awun) bagi semua kalangan masyarakat untuk tetap melksanakan ajaran-ajaran agama dengan baik dan benar. Dengan beradanya persamaan dan kesempatan untu dapat berusaha maka tidak mungkin ada lagi kesenjangan sosial dan ekonomi diantara satu dengan lainnya.<sup>6</sup>

Konsep pemberdayaan masyarakat searah dengan ajaran-ajaran Islam, tidak hanya mengajarkan kepada semua manusia untuk selalu memperhatikan lingkungan sekitar. Artinya, pemberdayaan masyarakat meerupakan sebuah bentuk indikasi nilai-nilai kemanusiaan yang ada dalam ajaran Islam.<sup>7</sup> pemberdayaan dalam Islam padakonsepanya memiliki keterkaitan dengan berbagai hal yaitu:

- 1) Kesadaran mengenai ketergantungan diri, tertindas dan yang menindas.
- 2) Kesan dari analisi mengenai lemahnya tawar menawar masyarakat terhadap dunia bisnis.

---

<sup>5</sup> Mustangin Dkk, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Program Desa Wisata di Desa Bumiaji Sosioglobal*, Pemikiran dan Penelitian Sosiologi no. 2 . 1, 59.

<sup>6</sup> Adib Susilo, "Model Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Islam", *Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no.2 (2016), 201

<sup>7</sup> Achmad Saeful dan Sri Ramdhayanti, *Konsep Pemberdayaan Masyarakat Dalam Islam*, Syar'ie 3, (2020), 5.

3) Paham strategi untuk “lebih baik memberikan kail dari pada memberikan ikan” ketikamemebrikan bantuan kepada yang membutuhkan, dengan kata lain lebih mengedepankan pembinaan kemandirian dan keswadayaan.

Hal tersebut dapat dilaksanakan dengan usaha mengembangkan pembangunan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia.<sup>8</sup>

**c. Tahap Tahap Pemberdayaan Masyarakat**

Proses pemberdayaan memiliki 3tahapan yaitu sebagai berikut :<sup>9</sup>

1) Tahap Pertama

Tahap pertama yaitu tahap penyadaran, tahapan ini dilakukan dengan memebrikan pencerahan dengan memberikan penyadaran bahwasannya mereka memiliki hak untuk memiliki sesuatu.contohnya yaitu kelompok masyarakat miskin. Pemahaman diberikan pada mereka bahwa mereka bisa keluar dari kemiskinannya dengan cara pemberian pengetahuan yang sifatnya healing, belief, dan kognisi. Prinsip dasarnya yaitu membuat mengerti si target bahwasannya mereka bisa membangun mimpi, diberdayakan dan aktivitas pemebrdayaannya diawali dari dalam diri bukan dari luarnya.

2) Tahap Kedua

Tahap kedua ualah tahap memberikan kapasitas atau “*capacity bulding*”, memampukan atau kemampuan. Sebelum melakukan sesuatu hendaknya diberikan pelatihan atau kemmpauan terlebih dahulu, contohnya sebelum memberikan otonomi daerah, daerah-daerah yang hendak di otonomikan diberikan program kemampuan terlebih dahulu guna untuk membuat mereka mampu dalam mengelola otonomi yang diberikan. Pengkapasitasan organisasi dicoba dalam wujud restrukturasi sanggup melakukan otonomi wilayah dengan baik serta benar sebab

---

<sup>8</sup> M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial, Ekonomi, Lembaga Studi Agama dan Filsafat*, (Yogyakarta, 1999), 389.

<sup>9</sup> Hendrawati Hamid, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*, 11.

permasalahan tidak memadainya kecakapan wilayah dalam melaksanakan otonomi wilayah. Bayaran otonomi wilayah umumnya sangat mahal sebab pengkapasitasan setelah memberikan otonomi berjumpa dengan ketergantungan serta resistensi yang sepatutnya tidak terjalin. Peran pemerintah di Desa wisata Penglipuran dalam perihal ini merupakan tingkatan sumber energi manusia lewat tutorial, pelatihan dan penyuluhan sektor pariwisata ataupun kepada masyarakat yang mempunyai usaha kerajinan di zona obyek wisata.

### 3) Tahap ketiga

Tahap ketiga ialah lumayan simpel tetapi, kita tidak pandai ketika melaksanakannya disebabkan mengabaikan kalau dalam kesederhanaan juga terdapat dimensi. Tahap ini umumnya disebut tingkatan keahlian intelektual warga. Pokok gagasannya merupakan kalau proses pemberian energi ataupun kekuasaan diberikan suatu dengan kemampuan penerima. Diberikannya kredit kepada suatu kelompok miskin yang lewat proses pengkapasitasan dan penyadaran masih butuh disesuaikan dengan keahlian manajemen usaha. Jika perputaran usahanya sanggup mencapai 5 juta bukanlah diberikan pinjaman modal sebesar 50 juta.

### d. Tujuan dan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

Sebagai aktivitas proses, maka semestinya kegiatan/program pemberdayaan masyarakat diinginkan dapat mengangkat kehidupan masyarakat sebagai kelompok sasaran menjadi lebih memiliki kekuatan, berdaya dan sejahtera dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. kemandirian ini tidak hanya dari sisi ekonominya, namun secara hak berpendapat/bersuara, budaya, sosial bahkan sampai pada mandirinya suatu masyarakat dalam penentuan hak politiknya. Masyarakat sudah bisa menentukan dan memahami sendiri hak politiknya ketika memilih pemimpin (di level nasional dan daerah) yang terbaik, ataupun ketika memilih anggota legislatif sebagai wakil rakyat. Masyarakat sudah tidak merasakan ketakutan mengenai tekanan pihak tertentu dalam menentukan pilihannya, ataupun dengan adanya

janji/iming-iming yang sifatnya hanya lip service atau retorika, atau disebabkan sogokan berbentuk apapun (sandang, uang, sembaku dan lainnya). Ketika tujuan akhir suatu kegiatan/program pemberdayaan ialah wujudnya kemandirian masyarakat dalam menentukan pilihan terbaik bagi mereka.<sup>10</sup>

Tujuan utama pemberdayaan yaitu menguatkan kekuasaan masyarakat, khususnya masyarakat lemah yang tidak berdaya, baik dari sisi internal maupun eksternal. Dalam memberikan kelengkapan pemahaman mengenai pemberdayaan mesti dipahami mengenai konsep kelompok lemah dan penyebab ketidakberdayaannya.

Berbagai kelompok yang bisa dikategorisasi sebagai kelompok tidak berdaya atau lemah ialah:<sup>11</sup>

- 1) Lemah secara struktural, atau lemah dalam kelas ekonomi di masyarakat, etnis maupun gender yang memperoleh perlakuan diskriminatif atau tidak adil.
- 2) Lemah secara khusus, ialah masyarakat terasing, gay-lesbian, penyandang cacat, remaja, anak-anak, dan manula.
- 3) Lemah secara personal, yaitu manusia yang memiliki masalah keluarga atau pribadi.

#### e. Proses-Proses Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat yaitu untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam menumbuhkan atau memperbaiki taraf hidupnya, sehingga masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraannya. Ada beberapa proses pemberdayaan yang dilakukan masyarakat secara bersama-sama, yaitu sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi dan mengkaji potensi wilayah, permasalahan dan peluang-peluangnya.

Pada kegiatan ini, masyarakat diminta untuk percaya diri dan mampu dalam menganalisa keadaan, baik dari segi potensi ataupun permasalahan yang sedang dihadapi. Dalam tahap

---

13. <sup>10</sup> Hendrawati Hamid, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*,

15. <sup>11</sup> Hendrawati Hamid, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*,

ini, diharapkan dapat memperoleh gambaran terkait aspek sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Proses ini meliputi:

- a) Proses pertama yaitu persiapan masyarakat dan pemerintah setempat untuk melakukan pertemuan awal dan teknis pelaksanaannya,
  - b) Proses kedua yakni persiapan penyelenggaraan pertemuan,
  - c) Setelah melakukan persiapan penyelenggaraan pertemuan, maka selanjutnya yaitu pelaksanaan kajian dan penilaian keadaan,
  - d) Proses selanjutnya ialah pembahasan hasil dan penyusunan tidak lanjut.
- 2) Menyusun rencana kegiatan kelompok, menurut hasil kajian, sebagai berikut:
- a) Kajian pertama yakni menganalisa masalah-masalah yang terjadi,
  - b) Kajian kedua mengenai identifikasi alternatif pemecahan masalah yang lebih baik,
  - c) Ketiga kajian tentang identifikasi sumberdaya yang tersedia untuk memecahkan permasalahan,
  - d) Setelah melakukan kajian pertama, kedua dan ketiga, maka kajian keempat ini tentang pengembangan rencana kegiatan serta pengorganisasian pelaksanaannya.
- 3) Menerapkan rencana kegiatan kelompok  
Rencana yang sudah tersusun secara bersama dengan dukungan fasilitasi dari pendamping/fasilitator kemudian diimplementasikan ke dalam kegiatan yang konkret atau nyata dengan tetap memperhatikan realisasi dan rencana awal. Kegiatan ini, meliputi pemantauan pelaksanaan dan kemajuan kegiatan.
- 4) Memantau proses dan hasil dari kegiatan secara terus-menerus secara partisipatif (*participatory monitoring and education*)  
Tahap ini dimaksudkan pada suatu proses penilaian, pengkajian dan pemantauan kegiatan yang mencakup pelaksanaan, hasil, dan dampak supaya

akan dapat disusun proses perbaikan apabila diperlukan.<sup>12</sup>

## 2. Masyarakat Muslim

### b. Pengertian Masyarakat Muslim

Masyarakat muslim yaitu masyarakat yang terbuka menjunjung tinggi nilai kehidupan dan kemanusiaan secara universal tanpa memandang agama, bangsa, suku dan asal usul.<sup>13</sup> Masyarakat muslim ialah kelompok manusia yang bekerjasama dan hidup berdasarkan Al-Qur'an dan hadits.<sup>14</sup>

Masyarakat dalam pemikiran Islam yaitu fasilitas untuk melakukan syariat Islam yang menyangkut kehidupan bersama. Masyarakat wajib menjadi dasar kerangka kehidupan dunia untuk kesatuan serta kerja sama umat mengarrh erdapatnya sesuat perkembangan manusia yang mewujudkan keadilan dan persamaan. Bukan dikatakan masyarakat muslim apabila senantiasa diliputi dengan dendam ataupun kedzaliman.<sup>15</sup>

### c. Prinsip- Prinsip Masyarakat Muslim

Adapun prinsip-prinsip dalam pemberdayaan masyarakat muslim diantaranya yaitu sebagai berikut:

#### 1) Partisipasi

Partisipasi yang dimaksud di sini yaitu masyarakat harus terlibat secara langsung dalam setiap proses pengambilan keputusan dan ikut serta dalam menjalankan pembangunan.<sup>16</sup> Sebagaimana firman Allah SWT di dalam QS. Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi:

---

<sup>12</sup> Totok Mardikanto, *Konsep-konsep Pemberdayaan Masyarakat*, 143-144.

<sup>13</sup> Endang Saifuddin Anshari, *Wawasan Islam*, (Bandung: Mizan, 1986), 72.

<sup>14</sup> Sidy Gazalba, *Masyarakat Islam Pengantar Sosiologi dan Sosiografi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 126.

<sup>15</sup> Muhammad Hatta, *Jurnal Keislaman*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2012.

<sup>16</sup> Muhtadi, *Manajemen Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)*, 21



يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ  
 شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ  
 قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ  
 لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا  
 تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Maidah: 8)<sup>17</sup>

Penggalan QS. Al-Maidah ayat 8 ini Allah memerintahkan kepada seluruh orang mukmin agar berlaku jujur dalam mengerjakan pekerjaan, baik pekerjaan yang bersangkutan dengan agama maupun pekerjaan yang bersangkutan dengan dunia.

## 2) Kesetaraan dan Keadilan Gender

Kesetaraan dan keadilan gender yang dimaksud yaitu laki-laki dan perempuan memiliki kesetaraan dalam mengambil perannya disetiap

<sup>17</sup> Al-Qur'an, Al-Maidah ayat 8, *Mushaf Al-Burhan edisi Keluarg Terjemah Per-kata Tajwid*, 108.

tahap pembangunan dan menikmati manfaat dari kegiatan pembangunan tersebut.<sup>18</sup> Sebagaimana yang dimaksud dalam firman Allah SWT QS. Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ  
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ  
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ



Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”. (QS. Al-Hujarat: 13)<sup>19</sup>

Maksud dari penggalan ayat diatas yaitu larangan manusia untuk merendahkan orang lain atau merasa dirinya paling benar daripada lainnya. Selain itu, dalam surah ini juga menegaskan bahwa manusia diciptakan untuk saling mengenal satu sama lain. Laki-laki maupun perempuan tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain. karena pada hakikatnya kita sebagai makhluk sosial.

### 3) Demokratis

<sup>18</sup> Muhtadi, *Manajemen Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)*, 21

<sup>19</sup> Al-Qur'an, al-Hujarat ayat 13, *Mushaf Al-Burhan edisi Keluarg Terjemah Per-kata Tajwid*, 517.

Yang dimaksud demokratis disini yaitu pada setiap mengambil keputusan pembangunan , maka harus dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat dengan mengarah pada kepentingan masyarakat.<sup>20</sup> Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah Ali-Imran ayat 159, yang berbunyi:

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا  
 غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنَّفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ  
 عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا  
 عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
 الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.” (QS. Ali-Imran: 159)<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Muhtadi, *Manajemen Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)*, 21.

<sup>21</sup> Al-Qur'an, al-Hujarat ayat 13, *Mushaf Al-Burhan edisi Keluarg Terjemah Per-kata Tajwid*, 70-71.

Maksud dari penggalan ayat di atas yaitu Allah sudah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada semua umat manusia bahwa demokrasi yang dilakukan dengan cara bermusyawarah penting untuk dilakukan. Dalam menjalankan pemberdayaan masyarakat dan mengambil keputusan diminta untuk melakukan musyawarah dan hasil dari musyawarah harus mengambil jawaban dari keputusan masyarakat itu sendiri.

#### 4) Transparansi dan Akuntabel

Transparans dan akuntabel yaitu masyarakat harus memiliki akses terhadap segala informasi dan segala proses dalam pengambilan keputusan yang dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan.<sup>22</sup> Sebagaimana dalam firman Allah SWT QS. An-Nisa' ayat 58, yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا  
وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ  
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا  
بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya

<sup>22</sup> Muhtadi, *Manajemen Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)*, 22.

Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”. (QS. An-Nisa’: 58)<sup>23</sup>

Maksud dari penggalan ayat di atas yaitu dalam menjalankan proses pemberdayaan masyarakat dalam mengambil keputusan harus dilakukan dengan cara terbuka tidak ada yang di tutup-tutupi atau transparansi bertujuan agar masyarakat mempunyai rasa saling percaya antar individu dengan masyarakat lain. Sehingga menumbuhkan sifat sosial dan menguatkan hubungan sosial yang baik.

5) Keberlanjutan

Keberlanjutan yang dimaksud disini yaitu dalam setiap mengambil keputusan harus mempertimbangkan apa yang dibutuhkan masyarakat, agar kesejahteraan masyarakat tetap terjadi untuk saat ini maupun dimasa yang akan datang.<sup>24</sup> Sebagaimana Allah SWT telah berfirman pada QS. An-Nahl ayat 97 yang berbunyi:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ  
مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ  
أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik[839] dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih

<sup>23</sup> Al-Qur’an, al-Hujarat ayat 13, *Mushaf Al-Burhan edisi Keluarg Terjemah Per-kata Tajwid*, 87.

<sup>24</sup> Muhtadi, *Manajemen Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)*, 22.

baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (QS. An-Nahl:97)<sup>25</sup>

Dapat dijelaskan dmaksud dari penggalan ayat diatas yaitu perbuatan manusia bisa dikatakan baik apabila mereka berbuat kebaikan kepada sesama. Dalam pemberdayaan masyaraat, masyarakat dituntut utuk tidak bergantung pada pemerintah dan menjadikan masyarakat hidup mandiri, maju, serta memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga tercipta kesejahteraan dalam masyarakat.

### 3. Desa Wisata

#### a. Pengertian Desa Wisata

Desa wisata menurut Fandeli merupakan wilayah pedesaan yang memebrikan penawran susasana yang menggambarkan keaslian desa, baik dari sisi tataruang desa, arsitektur bangunan, aktivitas keseharian adat istiadat, kehidupan sosial budaya serta potensi yang bisa dikembangkan menjadi daya tarik wisata yaitu: penginapan, cinderamata, makanan dan minuman, atraksi dan kebutuhan lain wisata.<sup>26</sup> Melalui berbagai deskripsi ini maka desa wisata diartikandengan desa yang hidup secara mandiri dengan potensi yang terdapat didalamnya dan bisa menjual berbagai atraksi sebagai daya tarik wisata tanpa adanya investor.

Desa wisata merupakan pengembangan sesuatu daerah desa yang pada hakikatnya tidak merubah apa yang telah terdapat namun lebih cenderung kepada penggalian kemampuan desa dengan memanfaatkan keahlian unsur-unsur yang terdapa dalam desa (mewakili serta dioperasikan oleh penduduk desa) yang berperan selaku atribut produk wisata dalam skala kecil jadi rangkaian kegiatan pariwisata, dan sanggup sediakan serta penuh serangkaian kebutuhan

---

<sup>25</sup> Al-Qur'an, al-Hujarat ayat 13, *Mushaf Al-Burhan edisi Keluarg Terjemah Per-kata Tajwid*, 278.

<sup>26</sup> Itah Masitah, Pengembangan Desa Wisata Oleh Pemerintah Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 6, No 3, (2019), 49.

ekspedisi wisata baik aspek energi tarik ataupun selaku sarana pendukungnya.

Desa wisata yaitu pengembangan dari sesuatu desa yang mempunyai kemampuan wisata serta dilengkapi dengan sarana pendukung semacam perlengkapan transportasi ataupun penginapan. Tidak hanya itu, alam serta area pedesaan yang masih asli serta terpelihara jadi salah satu aspek berarti dari kawasan desa wisata. Lewat desa wisata, bermacam kegiatan keseharian warga jadi energi tarik untuk wisatawan, sehingga desa wisata tidak mengganti wajah desa, namun malah menguatkan kekhasan yang dipunyai oleh tiap desa, baik kekhasan budaya ataupun alamnya.

Desa ialah kesatuan hukum yang mana disana terdapat tempat tinggalnya masyarakat pemerintahan sendiri. Desa ialah kesatuan atau perwujudan geografi, kultur, politik, ekonomi dan sosial yang berada ditempat itu (suatu daerah), dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain.<sup>27</sup>

Dengan karakteristik berikut:

- 1) pergaulan hidupnya saling mengenali antara ribuan jiwa.
- 2) munculnya pertalian yang sama mengenai kesukaan terhadap kebiasaan.
- 3) Cara berusaha (ekonomi) dominasinya ialah agraris dan dipengaruhi oleh, kekayaan alam, keadaan alam, iklim dan lain sebagainya sedangkan pekerjaan selain agraris sifatnya sambilan.

Makna mengenai desa memiliki kompleksitas yang saling berhubungan antar unsur didalamnya dan sebenarnya desa dipandang sebagai pemelihara dan standar sistem kehidupan bermasyarakat dan kebudayaan asli seperti kesenian kehidupan moral susila, adat istiadat, epribadian dalam berpakaian, gotong royong, persaudaraan, keguyuban, tolong

---

<sup>27</sup> Bintarto, R. *Interaksi Desa, Kota dan Permasalahannya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989), 45.

menolong dan lain sebagainya dengan ciri yang jelas.<sup>28</sup> Desa memiliki batasan wilayah dengan kewenangan mengurus dan mengatur kebutuhan masyarakat, berdasarkan adat istiadat dan asal usul yang dihormati dan diakui dalam sistem pemerintahan NKRI.<sup>29</sup> *Talcot Parsons* menggambarkan masyarakat desa dengan masyarakat tradisional dengan ciri-cirinya yaitu:<sup>30</sup>

- a) Afektifitas memiliki hubungan dengan rasa kasih sayang, kemesraan dan kesetiaan. Dibuktikan dengan perbuatan dan sikap saling menolong, simpati dengan adanya musibah yang diderita orang lain dan memberikan pertolongan tanpa adanya pamrih.
- b) Orientasi kolektif sifat ini ialah konsekuensi dari Afektifitas, ialah masyarakat mementingkan kebersamaan, tidak menyukai perbedaan pendapat, menonjolkan diri, atau bisa dikatakan bahwasannya harus memperlihatkan keseragaman rasa.
- c) Partikularisme yaitu semua hal yang berkaitan dengan berlakunya suatu hal dalam daerah atau tempat tertentu. Perasaan kebersamaan, subyektif sebenarnya hanya berlaku pada kelompok tertentu saja.
- d) Askripsi ialah berkaitan dengan sifat khusus atau mutu yang tidak didapatkan berdasarkan usaha yang tidak disengaja, namun suatu keadaan yang sudah menjadi keturunan atau kebiasaan.
- e) Kekabaran (*Diffuseness*). Ialah sesuatu yang tidak memiliki kejelasan berkaitan dengan hubungan antar manusia tanpa ketegasan yang dinyatakan eksplisit. Bahasa tidak langsung digunakan oleh masyarakat desa dalam memperlihatkan sesuatu. Melalui hal ini bisa diketahui bahwasannya desa

---

<sup>28</sup> G. Kartasapoetra, Hartini, *Kamus Sosiologi & Kependudukan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), 89.

<sup>29</sup> Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004.

<sup>30</sup> G. Kartasapoetra, Hartini, *Kamus Sosiologi & Kependudukan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), 90-91.



masih murni tanpa ada pengaruh dari luar yang mempengaruhi masyarakatnya.<sup>31</sup>

#### **b. Kriteria Desa Wisata**

Adapun beberapa kriteria desa wisata yaitu sebagai berikut:

- 1) Mempunyai kemampuan keunikan serta energi daya tarik wisata yang khas baik berbentuk kepribadian raga area alam pedesaan ataupun social budaya kemasyarakatan.
- 2) Mempunyai dukungan serta kesiapan sarana pendukung kepariwisataan terpaut dengan aktivitas wisata pedesaan.
- 3) Mempunyai interaksi dengan pasar turis yang tercermin dari kunjungan turis.
- 4) Munculnya inisiatif dari masyarakat setempat berkaitan dengan dikembangkannya desa prihal sektor pariwisata.<sup>32</sup>

Manajemenisasi desa wisata ialah bagian dari pemerintah desa dan masyarakat, namun pemerintah desa mempunyai posisi dan kapaistas yang tidak sama jika dibandingkan dengan masyarakat. menurut UU No 6 Tahun 2014 mengenai desa mendeskripsikan mengenai kewenangan dan hak desa dalam mengurus dan mnegatur masyarakat di dasarkan pada nilai budaya, adat istiadat dan asal usul masyarakat. Nugroho dan Sutaryono menjelaskan bahwasannya munculnya UU ini, memandang desa sebagai entitas yang bisa mandiri atas dirinya dengan cara pengelolaan potensi atau aset yang terdapat di dalam desa yang menjadi sumber kehidupannya.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Yoeti, Oka A. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. (Bandung: Angkasa, 1993),12.

<sup>32</sup> T. Prastyo Hadi Admoko, *Strategi Pengembangan Potensi Desa Wisata Brajan Kabupaten Sleman*, Media Wisata ,12 no.2 (2014),148.

<sup>33</sup> Itah Masitah, *Pengembangan Desa Wisata Oleh Pemerintah Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran*, 49.

### c. Pengembangan Desa Wisata

Dikembangkannya desa wisata menjadi proses yang menekankan cara dalam memajukan atau mengembangkan desa wisata. Secara spesifik, pengembangan desa wisata dimaknai dengan upaya dalam meningkatkan dan melengkapi fasilitas wisata dalam memenuhi harapan wisatawan. Masyarakat lokal memainkan peran yang penting dalam mengembangkan desa wisata karena keunikan budaya dan tradisi serta sumber daya yang ada melekat pada komunitas tersebut menjadi unsur penggerak utama desa wisata. Selain itu, komunitas lokal yang hidup dan tumbuh berdampingan dengan objek wisata menjadi bagian dari sistem ekologi yang saling berkaitan.<sup>34</sup>

Soemarno mengemukakan bahwa untuk suksesnya pengembangan desa wisata perlu ditempuh upaya upaya sebagai berikut:

- 1) Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) bisa dilakukan melalui pendidikan, pelatihan dan keikutsertaan dalam seminar, diskusi, dan lain sebagainya serta di bidang-bidang kepariwisataan.
- 2) Kemitraan atau kerja sama dapat saling menguntungkan antara pihak pengelola desa wisata dengan para pengusaha pariwisata di kota atau pihak pembina desa wisata dalam hal ini pihak dinas pariwisata daerah. Bidang-bidang usaha yang dikerjakasamakan antara lain seperti bidang akomodasi, perjalanan, promosi, pelatihan, dan lain-lain.
- 3) Kegiatan pemerintahan di desa. Kegiatan dalam rangka desa wisata yang dilakukan oleh pemerintah desa, antara lain seperti rapat-rapat dinas, pameran pembangunan, dan upacara hari-hari besar diselenggarakan di desa wisata.

---

<sup>34</sup> T. Prastyo Hadi Admoko, *Strategi Pengembangan Potensi Desa Wisata Brajan Kabupaten Sleman*, Media Wisata ,12 no.2 (2014), 150.

- 4) Promosi Desa wisata harus sering dipromosikan melalui berbagai media.
- 5) Festival/pertandingan. Secara rutin diselenggarakan kegiatankegiatan yang bisa menarik wisatawan atau penduduk desa lain untuk mengunjungi desa tersebut, misalnya mengadakan pertandingan, festival, dan lainlain.
- 6) Membina organisasi masyarakat. Penduduk desa yang biasanya merantau kemudian mudik atau tradisi lain dapat dibina dan diorganisir untuk memajukan desa wisata mereka.
- 7) Kerja sama dengan universitas. Kerja sama sebaiknya dilakukan dengan universitas atau perguruan tinggi yang melakukan pengembangan dan pengabdian supaya dilaksanakan di desa wisata. Hal ini guna membuka peluang dan masukan bagi kegiatan di desa wisata<sup>35</sup>

Pengembangan pariwisata harus dilakukan dengan baik sehingga dapat diterima dan didukung oleh masyarakat lokal, dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip lingkungan dan ekologis, peka terhadap tradisi budaya dan agama setempat, serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat lokal khususnya.

#### **d. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata**

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan yaitu perihal yang berarti ketika diletakkan atas dasar kepercayaan bahwa masyarakatlah yang sangat mengetahui apa yang diperlukan. Partisipasi yang hakiki akan mengaitkan warga dalam totalitas tahapan pengembangan, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan, serta pengawasan program pengembangan desa wisata. Keikutsertaan warga ini sangat dipengaruhi oleh keinginan, peluang, serta keahlian dari warga tersebut. Keikutsertaan warga dalam perencanaan desa wisata bisa mendesak mereka

---

<sup>35</sup> Tadjuddin Noer Effendi, Strategi Pengembangan Masyarakat :Alternatif pemikiran Reformatif, *jurnal ilmu Sosial dan Politik* .3 no. (1999), 121.

berpartisipasi aktif dalam penerapan serta pengawasan.<sup>36</sup>

Berdasarkan hal tersebut bisa dirumuskan model pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Berikut dibawah ini akan dijelaskan partisipasi warga dalam keseluruhan:

- 1) Partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan Parameter yang digunakan untuk memastikan derajat partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan merupakan keterlibatan dalam identifikasi masalah, formulasi tujuan, serta pengambilan keputusan terkait dengan pengembangan desa wisata.
- 2) Partisipasi masyarakat lokal dalam tahap implementasi Parameter. Partisipasi masyarakat dalam tahap implementasi merupakan keterlibatan di dalam pengelolaan usaha-usaha pariwisata. contohnya, slaku pengelola penginapan, pengelola rumah makan, pemandu wisata, karyawan hotel, serta pengelola atraksi wisata. Keterlibatan masyarakat lokal dalam tahap implementasi dalam makna pemanfaatan kesempatan nampak sedikit. Sekalipun bentuk partisipasi itu ada, wujudnya lebih pada pengelolaan usaha berskala kecil.
- 3) Partisipasi masyarakat lokal dalam tahap pengawasan Masyarakat lokal mempunyai kedudukan kontrol yang sangat substansial dalam pengembangan desa wisata sebab control terhadap proses pengambilan keputusan wajib diberikan kepada mereka yang nantinya menanggung akibat penerapan pengembangan termasuk kegagalan atau dampak negatif yang terjadi akibat pengembangan desa wisata. Oleh karena itu, kewenangan pengambilan keputusan wajib diberikan kepada masyarakat lokal. Parameter partisipasi masyarakat dalam pengawasan merupakan keterlibatan dalam tim

---

<sup>36</sup>Ervina Desi Prapita , *Pengembangan Desa Wisata* (Sukoharjo: CV Graha Printama Selaras), 40.

pengawasan berikut kewenangan yang dipunyai.<sup>37</sup>

Pengembangan masyarakat merupakan usaha bersama serta terencana buat tingkatan mutu kehidupan manusia meliputi bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan serta social budaya. prinsip prinsip pengembangan masyarakat terdapat dalam firman Allah SWT QS. Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi:

لَهُر مُعَقَّبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ۖ يَحْفَظُونَهُ  
 مِّنْ أَمْرِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ  
 يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا  
 مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ ۖ مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾

Artinya: “bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah[767]. Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan[768] yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”. (QS. Ar-Ra’ad: 11)<sup>38</sup>

<sup>37</sup> Tadjuddin Noer Effendi, Strategi Pengembangan Masyarakat :Alternatif pemikiran Reformatif, *jurnal ilmu Sosial dan Politik* .3 no. (1999), 121.

<sup>38</sup> Al-Quran, Ar-Ra’d Ayat 11, *Alquran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, Alquran Terjemah Al-Hakim, 2016), 250.

Dalam surat ini yakni dengan memakai wujud kalimat perintah berbeda dengan surat yang lain yang memakai redaksi dalam wujud kalimat pernyataan serta terkadang dalam wujud kalimat negatif. Surat ini mencakup 2 sisi manusia, kehidupan batin serta kehidupan lahir, social serta spiritual. surat ini surat yang pertama yang berajak bersosial ketika berawal masa Islam lahir sebelum masa surat *ad-dhuha* jika dilihat dari isi pembangunan personal nabi Muhammad SAW. Surat *Ar-Ra'ad* dikombinasikan dengan prinsip pengembangan masyarakat yang juga berisi menghasilkan keadaan yang aman, nyaman, tentram serta sejahtera dalam masyarakat.

## B. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu yang dijadikan landasan dilakukannya penelitian ini yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

| No | Penulis         | Judul   | Persamaan  | Perbedaan   |
|----|-----------------|---|--|---|
| 1. | Tyas Arma Rindi | Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata (Studi Kasus Desa Wonokarto, Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur). | sama-sama meneliti mengenai desa wisata yang dijadikan sebagai pemberdayaan masyarakat dan menggunakan metode penelitian kualitatif. | Dalam penelitian ini membahas tentang potensi pemberdayaan masyarakat serta langkah-langkah pengembangan dari potensi pemberdayaan masyarakat. sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh penulis tidak hanya |

|    |                 |   |  |   |
|----|-----------------|---|--|---|
|    |                 |   |  | meneliti pemberdayaan masyarakat desa wisata secara luas melainkan lebih tertuju ke masyarakat pembudidaya jeruk pamelو. <sup>39</sup>  |
| 2. | Mustang in dkk. | Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Program Desa Wisata Di Desa Bumiaji. | sama-sama meneliti mengenai Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal dan menggunakan metode penelitian kualitatif. | Dalam penelitian ini membahas tentang program pemberdayaan masyarakat untuk memaksimalkan potensi-potensi yang dimiliki oleh suatu desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh penulis membahas penulis tidak merujuk ke program desa, tetapi peran |

<sup>39</sup> Tyas Arma Rindi dengan judul, “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata ( Studi Kasus Desa Wonokarto, Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur)”, Skripsi Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro Tahun 2019.

|    |              |  |   |   |
|----|--------------|--|---|---|
|    |              |  |   | peran masyarakat untuk mengembangkan potensi desa. <sup>40</sup>  |
| 3. | Itah Masitah | Pengembangan Desa Wisata Oleh Pemerintah Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. | sama-sama meneliti pengembangan desa wisata metode penelitian kualitatif. | Dalam penelitian ini membahas tentang prinsip-prinsip pengembangan desa wisata. Sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti oleh penulis membahas tidak hanya meneliti pemanfaatan desa saja, tetapi tentang kendala pemembangan desa wisata. <sup>41</sup> |

### C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir yaitu menjelaskan tentang sebuah objek dari permasalahan dimana dari kita sendiri bukan dari pendapat orang lain. Dalam menyusun kerangka berfikir harus berdasarkan teori-teori yang relevan dan dengan menggunakan argumen-argumen yang bisa bertanggung jawab dan pada akhirnya menghasilkan sebuah kesimpulan.

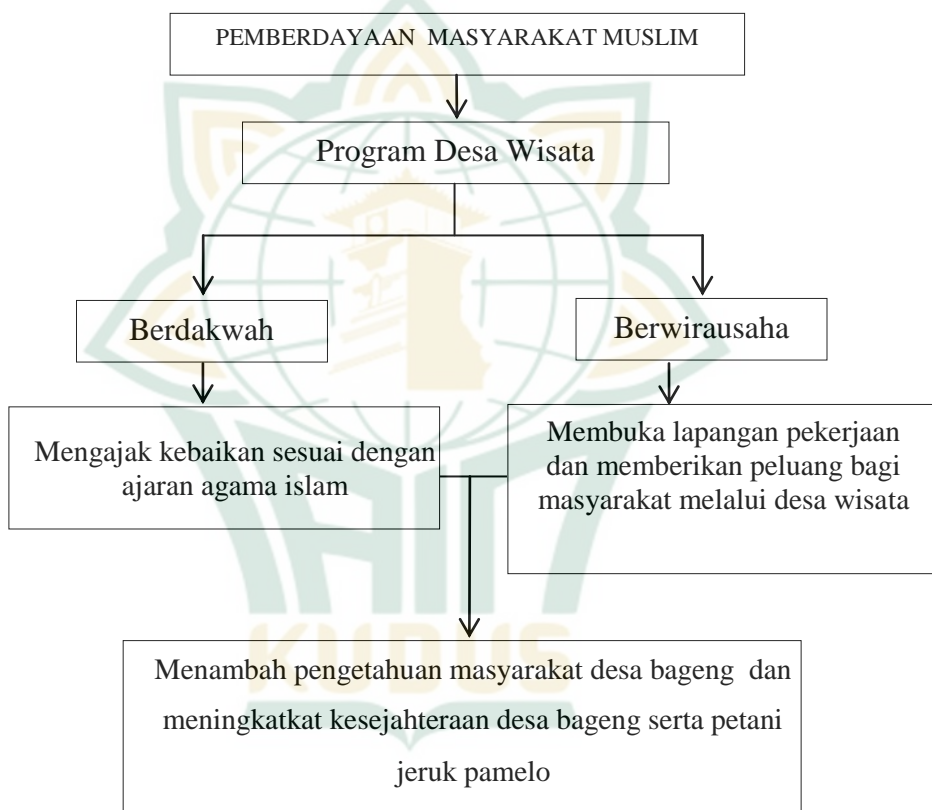
<sup>40</sup> Mustangin, Dkk, Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Program Desa Wisata Di Desa Bumiaji, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi* 2, no 1, (2017).

<sup>41</sup> Itah Masitah, *Pengembangan Desa Wisata Oleh Pemerintah Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran*, *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*. 6, no 3, (2019).



Kesimpulan tersebut menjadi hipotesis sebagai jawaban dari permasalahan penelitian.<sup>42</sup> Berdasarkan penjelasan diatas, kerangka berfikirnya dapat digambarkan dibawah ini sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berfikir**



<sup>42</sup> Fitrianti, "Sukses Profesi Guru dengan Penelitian Tindakan Kelas", (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 43-44.